

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, T.B. (2009), E-Government as an anti-corruption strategy. *Information Economics and Policy*. Volume 21 Issue no.3, August 2009, hal. 201-210. <http://www.sciencedirect.com/science/journal/01676245/21/3>
- Asorwoe, E. (2014). Can E-Government Mitigate Administrative Corruption? An Empirical study. *Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, Vol. 3 (4), 41-47.
- Choi, J. W. (2014). E-Government and Corruption: A Cross Country Survey. *World Political Science Review*, 10(2), 217-236.
- Chrisna, S, dan Zaenuddin (2015). Analisis Survey Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah Dan Pencegahannya Di Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Januari 2015, Hal. 51 - 65
- Elbahnasawy, N.G. (2014, May). E-Government, Internet Adoption and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, Volume 57, 114-126, ISSN 0305- 750X.
- García-Murillo, M. and Ortega.R.(2010). R.Doe-government initiatives reduce corruption? Available at SRRN <http://ssrn.com/abstract=2012470>
- Hartono, J. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: BPFE.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2011*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 : Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. Kegagalan Penerapan *E-Government* dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet. <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf> [31 Oktober 2011].
- Kurniawan, T. (2009, Mei-Agustus). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, 116-121.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- R.E.Indrajit, *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Penerbit: Andi, Yogyakarta.2002
- Rasul, S. (2008). Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26 (1).
- Santoso, U., & Pabelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14-33.
- Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Setyobudi, C. A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan *E-Government* terhadap Indeks Persepsi Korupsi: Studi Lintas Negara. Skripsi

- Transparency International Indonesia. (2016, Pebruari 17). Corruption Perceptions Index 2015. Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik. Retrieved from transparency Indonesia: <http://ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Vona, Leonard w. (2008). Fraud Risk Assessment: Building A Fraud Audit Program. New Jersey: *John Wiley and Sons, Inc'*
- Wahyuni, T. (2012). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Variabel Konstektualnya teradap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi. Universitas Indonesia.
- World Bank Group, '*Definition of e-Government,*' Retrieved from [http://wwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/04/13/000090341\\_20050413152954/Rendered/PDF/320450egovhandbook01public120021114.pdf](http://wwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/04/13/000090341_20050413152954/Rendered/PDF/320450egovhandbook01public120021114.pdf)."2002.